

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(002)**



LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2013
(Audited)

JL. JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2013 serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Lembaga yang dipimpinnya.

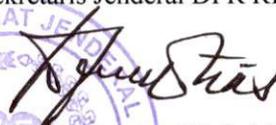
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan DPR RI Tahun 2013 *audited* ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 9 Mei 2014

Sekretaris Jenderal DPR RI


DR. Winantuningtyastiti. S, M.Si.
NIP. 19561125-198203 2 002





SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/ 5715 925 WEBSITE:
www.dpr.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 *audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 9 Mei 2014

Sekretaris Jenderal DPR RI


DR. Winantuningtvastiti. S. M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002



	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Pernyataan Telah Direviu	
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012)	4
II. Neraca (NSAIKPT perbandingan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012)	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.4. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	16
B.2. Belanja Negara	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	24
C.2. Aset Tetap	32
C.3. Aset Lainnya	51
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	58
C.5. Ekuitas Dana Lancar	61
C.6. Ekuitas Dana Investasi	62
D. Pengungkapan Penting Lainnya	
D.1. Catatan Penting Lainnya	64
D.2. Rekening Pemerintah	64
D.3. Pengungkapan Lain-lain	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	1
Tabel 2	2
Tabel 3	9
Tabel 4	14
Tabel 5	15
Tabel 6	16
Tabel 7	16
Tabel 8	17
Tabel 9	18
Tabel 10	19
Tabel 11	20
Tabel 12	22
Tabel 13	22
Tabel 14	24
Tabel 15	24
Tabel 16	25
Tabel 17	26
Tabel 18	26
Tabel 19	27
Tabel 20	29
Tabel 21	29
Tabel 22	30
Tabel 23	31
Tabel 24	33
Tabel 25	33
Tabel 26	34
Tabel 27	38
Tabel 28	40
Tabel 29	42
Tabel 30	43
Tabel 31	45
Tabel 32	50
Tabel 33	51
Tabel 34	52
Tabel 35	52
Tabel 36	53
Tabel 37	58
Tabel 38	59
Tabel 39	60
Tabel 40	61
Tabel 41	61
Tabel 42	62
Tabel 43	63

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

Halaman
18



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2013

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2013 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 24 Februari 2014

Kepala Biro Perencanaan dan
Pengawasan


DRA. DAMAYANTI, M.SI.

Nip. 19620211 198703 2 002



RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2013 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp32.237.830.386,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp2.335.271.993.531,00 atau mencapai 80,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.898.569.426.000,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan TA 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	-	32.237.830.386	0,00%	21.307.661.087
Belanja Negara	2.898.569.426.000	2.335.271.993.531	80,56%	2.016.386.568.689

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.385.842.483.264,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp65.743.022.624,00 Aset Tetap (neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar Rp1.283.092.150.051,00 dan Aset Lainnya (neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar Rp37.007.310.589,00

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp50.400.784.437,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp1.335.441.698.827,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp15.342.238.187,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.320.099.460.640,00

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai Kenaikan/(penurunan)	
	31 Desember 2013	31 Desember 2012	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Aset				
Aset Lancar	65.743.022.624	45.970.757.299	19.772.265.325	30,08%
Aset Tetap	1.283.092.150.051	2.039.975.897.857	(756.883.747.806)	-58,99%
Aset Lainnya	37.007.310.589	45.032.237.430	(8.024.926.841)	-21,68%
Jumlah Aset	1.385.842.483.264	2.130.978.892.586	(745.136.409.322)	-53,77%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	50.400.784.437	25.334.723.613	25.066.060.824	49,73%
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	15.342.238.187	20.636.033.686	(5.293.795.499)	-34,50%
Ekuitas Dana Investasi	1.320.099.460.640	2.085.008.135.287	(764.908.674.647)	-57,94%
Jumlah Ekuitas Dana	1.335.441.698.827	2.105.644.168.973	(770.202.470.146)	-57,67%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.385.842.483.264	2.130.978.892.586	(745.136.409.322)	-53,77%

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

Dalam penyajian Neraca per 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
DAN 2012**

Uraian	Catatan	TA 2013			TA 2012
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	32.237.830.386	0,00%	21.307.661.087
Jumlah Pendapatan		-	32.237.830.386	0,00%	21.307.661.087
BELANJA	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	552.844.605.000	487.523.467.500	88,18%	484.260.746.152
2. Belanja Barang	B.2.2.	2.266.239.770.000	1.813.499.298.421	80,02%	1.488.968.825.938
3. Belanja Modal	B.2.3.	79.485.051.000	34.249.227.610	43,09%	43.156.996.599
Jumlah Belanja		2.898.569.426.000	2.335.271.993.531	80,56%	2.016.386.568.689

II. NERACA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Uraian	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET			
Aset Lancar	C.1.		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	Rp -	Rp 4.187.884.264
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2.	Rp 731.064	Rp 41.098
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3.	Rp 47.918.295.055	Rp 19.461.343.127
Jumlah Kas dan Bank		Rp 47.919.026.119	Rp 23.649.268.489
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	Rp -	Rp 7.468.407.149
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.5.	Rp -	Rp -37.342.036
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6.	Rp 517.472.222	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar	C.1.7.	Rp -2.587.361	
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp 514.884.861	Rp 7.431.065.113
Persediaan	C.1.8.	Rp 17.309.111.644	Rp 14.890.423.697
Jumlah Aset Lancar		Rp 65.743.022.624	Rp 45.970.757.299
Aset Tetap	C.2.		
Tanah	C.2.1.	Rp 188.409.157.000	Rp 188.409.157.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	Rp 634.196.973.114	Rp 602.864.782.648
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	Rp 811.031.260.536	Rp 808.549.785.883
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	Rp 67.937.884.595	Rp 64.901.869.781
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	Rp 370.981.600.642	Rp 371.207.967.145
KDP	C.2.6.	Rp 4.360.968.400	Rp 4.042.335.400
Akumulasi Penyusutan	C.2.7.	Rp -793.825.694.236	Rp -
Jumlah Aset Tetap		Rp 1.283.092.150.051	Rp 2.039.975.897.857
Aset Lainnya	C.3.		
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	Rp 27.953.090.474	Rp 18.259.646.774
Aset Lain-lain	C.3.2.	Rp 15.228.714.853	Rp 26.772.590.656
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	Rp -6.174.494.738	
Jumlah Aset Lainnya		Rp 37.007.310.589	Rp 45.032.237.430
JUMLAH ASET		Rp 1.385.842.483.264	Rp 2.130.978.892.586
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4.		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	Rp 36.271.895.529	Rp 1.122.258.712
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	Rp 930.999.168	Rp 773.655.004
Uang Muka dari KPPN	C.4.3.	Rp -	Rp 4.187.884.264
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.4.4.	Rp 13.197.889.740	Rp 19.250.925.633
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 50.400.784.437	Rp 25.334.723.613
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 50.400.784.437	Rp 25.334.723.613
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.5.		
Cadangan Piutang	C.5.1.	Rp 514.884.861	Rp 7.431.065.113
Cadangan Persediaan	C.5.2.	Rp 17.309.111.644	Rp 14.890.423.697
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.5.3.	Rp -1.550.759.150	Rp -911.800.120
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.5.6.	Rp -930.999.168	Rp -773.655.004
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		Rp 15.342.238.187	Rp 20.636.033.686
Ekuitas Dana Investasi	C.6.		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.6.1.	Rp 1.283.092.150.051	Rp 2.039.975.897.857
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.6.2.	Rp 37.007.310.589	Rp 45.032.237.430
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		Rp 1.320.099.460.640	Rp 2.085.008.135.287
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 1.335.441.698.827	Rp 2.105.644.168.973
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 1.385.842.483.264	Rp 2.130.978.892.586

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI bertugas menyelenggarakan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI,
- b. Pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian dibidang perundang-undangan, anggaran dan pengawasan kepada DPR RI,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2010-2014 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan DPR RI untuk periode 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan di lingkungan DPR RI. Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya. Dengan adanya Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 diharapkan terbangun kerjasama dengan Pemerintah yang lebih baik dan efektif melalui dukungan secara terencana bagi penguatan kelembagaan DPR RI melalui tercapainya keterpaduan program DPR RI dengan program pembangunan Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan kedewanan DPR RI didukung oleh Sekretariat Jenderal yang memberikan dukungan keahlian, administrasi dan teknis sesuai dengan tupoksi Dewan.

Renstra DPR RI memuat visi dan misi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan 5 (lima) tahun kedepan. Visi DPR RI yang menjadi acuan dalam penyiapan Renstra 2010-2014 adalah *terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur* dan visi Sekretariat Jenderal dalam Renstra 2010-2014 adalah *menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel*.

Misi DPR RI merupakan perumusan strategis, kebijakan, dan program kelembagaan DPR RI terutama dalam kerangka sistem perencanaan jangka panjang, jangka menengah yang diwakili renstra dan rencana kerja tahunan. Oleh karena itu, penetapan misi DPR RI menjadi penting untuk mengarahkan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, penetapan prioritas dan menjaga keberlanjutan kegiatan DPR RI, maka misi DPR RI dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien

- dan efektif;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran Negara yang akuntabel dan transparan;
 - c. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif dan akomodatif.

Untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya visi DPR RI, Setjen DPR RI yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan kedewanan merumuskan visi “*Menjadikan Sekretariat yang professional dan akuntabel*” yang berperan sebagai pendukung dan fasilitator dalam kegiatan-kegiatan kedewanan, dan menetapkan misi Setjen DPR RI tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat;
2. Mewujudkan dukungan keahlian administrasi yang tepat waktu;
3. Mewujudkan dukungan teknis yang prima.

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai Setjen DPR RI dalam tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

1. Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia;
2. Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam penguatan kelembagaan DPR RI;
3. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI;
4. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI; dan
5. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan DPR RI Tahun 2013 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah

DPR RI seperti eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup DPR RI adalah 2 (dua) satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 2 (dua) satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	01	Sekretariat Jenderal	1	-	-	-	1
2	02	Dewan	1	-	-	-	1

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah sebagai berikut:

(1). Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber jenis Pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi
Belanja*

(2). Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

(3). Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan

Aset Lancar

sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam Neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di Neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, sebagai berikut :
 1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan berupa barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4). Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

*Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5). Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana*

- Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan kewajiban Pemerintah.
- Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang.

(6). Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 4
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7). Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan Aset
Tetap*

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah

berdasarkan nilai perolehan.

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp
32.237.830.386,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp32.237.830.386,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2013

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	Rp 2.951.863.000	0,00%
2	Pendapatan Jasa	-	Rp 41.098	0,00%
3	Pendapatan luran dan Denda	-	Rp 2.112.745.611	0,00%
4	Pendapatan Lain-lain	-	Rp 27.173.180.677	0,00%
	Jumlah	-	Rp 32.237.830.386	0,00%

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp10.930.169.299,00 atau 51,29 persen dibandingkan TA 2012 yang disebabkan antara lain meningkatnya pendapatan lain-lain yaitu pengembalian belanja lainnya tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan TA 2012 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan TA 2012

No.	Uraian	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.951.863.000	3.787.958.340	(836.095.340)	-22,07%
4	Pendapatan Jasa	41.098	-	41.098	0,00%
5	Pendapatan luran dan Denda	2.112.745.611	4.577.115.353	2.464.369.742	-53,84%
6	Pendapatan Lain-lain	27.173.180.677	12.942.587.394	14.230.593.283	109,95%
	Jumlah	32.237.830.386	21.307.661.087	10.930.169.299	51,29%

Realisasi Belanja
Negara sebesar Rp
2.335.271.993.531,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada TA 2013 adalah sebesar Rp2.335.271.993.531,00 atau sebesar 80,56 persen dari anggarannya setelah dikurangi

pengembalian belanja sebesar Rp20.099.423.464,00. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada TA 2013 sebesar Rp2.898.569.426.000,00.

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1762/PB/2014 tanggal 17 Maret 2014 dijelaskan bahwa hasil rekonsiliasi antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas LKKL tahun 2013 (*unaudited*) menunjukkan bahwa pada BA.002 (DPR RI) masih terdapat selisih (suspensi) antara data SAU dan data SAI yaitu selisih pada pengembalian belanja beda kode BAES1 Satker periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 sebesar Rp9.206.255.197,00. Perbedaan tersebut disebabkan KPPN salah menginput kode BA yang seharusnya BA.002 diinput BA.022.

Berdasarkan surat tersebut, DPR RI telah melakukan ralat/koreksi ke KPPN Jakarta I dan sudah terbit perbaikan transaksi penerimaan Negara yaitu Surat KPPN Jakarta I No. S-1687/WPB.12/KP.0130/2014 tanggal 1 April 2014. Namun demikian, saat dilakukan rekonsiliasi ulang dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setelah rekonsiliasi tiga pihak pada tanggal 15 April 2014 masih terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI pada pengembalian belanja sebesar Rp6.959.799.111,00, yaitu terdapat perbedaan pada penginputan kode program dan kode kegiatan namun secara jumlah sama.

Anggaran dan realisasi belanja TA 2013 menurut program tersaji pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2013

Kode	Program	Anggaran	Realisasi	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI	Rp 428.348.427.000	Rp 321.042.476.142	74,94%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI	Rp 301.862.786.000	Rp 221.024.153.046	73,22%
06	Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	Rp 378.417.883.000	Rp 219.113.864.269	57,90%
07	Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	Rp 71.725.370.000	Rp 51.283.241.750	71,49%
08	Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	Rp 211.314.579.000	Rp 154.165.997.837	72,95%
09	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	Rp 1.506.900.381.000	Rp 1.368.642.260.487	90,82%
Total		Rp 2.898.569.426.000	Rp 2.335.271.993.531	80,56%

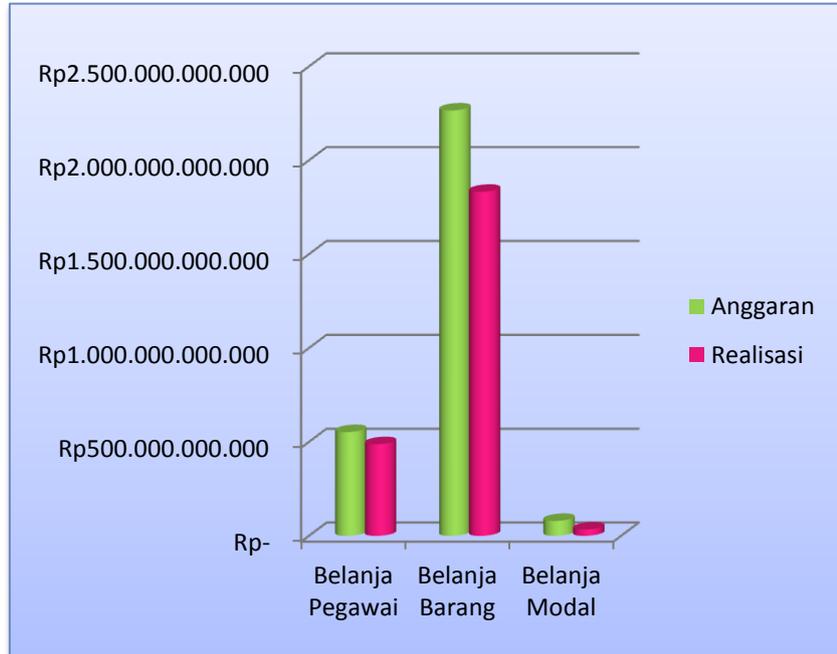
Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	Rp 552.844.605.000	Rp 488.352.999.476	88,33%
52	Belanja Barang	Rp 2.266.239.770.000	Rp 1.832.769.189.909	80,87%
53	Belanja Modal	Rp 79.485.051.000	Rp 34.249.227.610	43,08%
Jumlah Belanja Kotor		Rp 2.898.569.426.000	Rp 2.355.371.416.995	81,25%
Pengembalian Belanja			Rp 20.099.423.464	
Jumlah Belanja Netto		Rp 2.898.569.426.000	Rp 2.335.271.993.531	80,56%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik 1 berikut ini:

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013



Realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp318.885.424.842,00 atau 15,81% dibandingkan TA 2012 disebabkan antara lain oleh kenaikan belanja pegawai berupa

kenaikan gaji PNS sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013, adanya kenaikan belanja barang antara lain peningkatan pelaksanaan kunjungan kerja masa reses sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2013 dan perubahannya, serta meningkatnya pembahasan Rancangan Undang-undang di Alat Kelengkapan Dewan.

Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan TA 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2013	TA 2012	Rupiah	%
Belanja Pegawai	Rp 487.523.467.500	Rp 484.260.746.152	Rp 3.262.721.348	0,67%
Belanja Barang	Rp 1.813.499.298.421	Rp 1.488.968.825.938	Rp 324.530.472.483	21,79%
Belanja Modal	Rp 34.249.227.610	Rp 43.156.996.599	Rp -8.907.768.989	-20,64%
Jumlah Belanja	Rp 2.335.271.993.531	Rp 2.016.386.568.689	Rp 318.885.424.842	15,81%

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 487.523.467.500,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp487.523.467.500,00 dan Rp484.260.746.152,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp3.262.721.348,00 atau 0,67% antara lain disebabkan:

- Adanya kenaikan gaji PNS sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013, yaitu untuk Golongan I sebesar 6,3%; Golongan II sebesar sebesar 6,8%; Golongan III sebesar 7,1%; dan Golongan IV sebesar 7,1%;
- Adanya pengangkatan 28 orang tenaga honorer menjadi CPNS yang dihitung mulai tanggal 1 Februari 2013;
- Pengangkatan 4 orang fungsional pustakawan tahun 2012 yang tunjangan dibayarkan mulai tahun 2013;
- Pembayaran rapel tunjangan fungsional bulan Agustus 2012 s.d. Januari 2013 yang dibayarkan pada bulan Maret 2013;
- Meningkatnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar jam kerja pada unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

URAIAN	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2013	TA 2012	Rupiah	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 74.108.745.705	Rp 68.599.278.029	Rp 5.509.467.676	8,03%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	Rp 272.189.193.771	Rp 273.863.857.171	Rp -1.674.663.400	-0,61%
Belanja Honorarium	Rp 141.422.900.000	Rp 141.996.300.000	Rp -573.400.000	-0,40%
Belanja Lembur	Rp 632.160.000	Rp 273.589.000	Rp 358.571.000	131,06%
Belanja Tunjangan Khusus dan Transit	Rp -	Rp -	Rp -	-
Realisasi Belanja Bruto	Rp 488.352.999.476	Rp 484.733.024.200	Rp 3.619.975.276	0,74%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>Rp -829.531.976</i>	<i>Rp -472.278.048</i>	<i>Rp -357.253.928</i>	<i>75,64%</i>
Realisasi Belanja Netto	Rp 487.523.467.500	Rp 484.260.746.152	Rp 3.262.721.348	0,67%

*Belanja Barang
sebesar Rp
1.813.499.298.421,00*

B.2.2. Belanja Barang

Pada tahun anggaran 2013 terdapat perubahan kebijakan belanja barang khususnya belanja perjalanan dinas sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2056/MK.5/2013, tanggal 18 Maret 2013 perihal langkah-langkah dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi belanja perjalanan dinas menyebabkan terjadinya perubahan akun perjalanan dinas, yaitu:

No.	Uraian	Penggunaan Akun	
		Semula	Menjadi
1	Belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan operasional satker	Akun 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	Akun 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
2	Belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual)	Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Akun 524114 Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota

Untuk menindaklanjuti surat tersebut DPR RI melakukan revisi DIPA yaitu pada revisi ke-2 baik Satker Sekretariat Jenderal maupun Satker Dewan pada tanggal 11 April 2013. Pada bulan Juli 2013 terdapat kebijakan lebih lanjut mengenai belanja perjalanan dinas yaitu Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang menyatakan dalam hal DPR RI telah melakukan revisi DIPA pada bulan April 2013 maka Kementerian/Lembaga yang telah melakukan revisi menggunakan anggaran yang telah direvisi sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pada revisi ke-4 Satker Sekretariat Jenderal tanggal 24 Juli 2013 dilakukan penertiban terhadap penggunaan akun belanja yang disesuaikan Bagan Akun Standar (BAS) yaitu penertiban akun pada belanja pemeliharaan dan uang lelah

di Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi serta Biro Umum. Akun tersebut adalah 523199 menjadi 523119 dan 521115 menjadi 521119.

Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.813.499.298.421,00 dan Rp1.488.968.825.938,00 Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp 324.530.472.483,00 atau 21,79 persen antara lain disebabkan antara lain:

- Pada semester II TA 2013 terdapat perubahan jumlah kegiatan kunjungan kerja Anggota Dewan terhadap konstituennya di daerah untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga Nomor 18/BURT/2013 tentang Penetapan Perubahan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2013, dan pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan SK Sekjen No. 11/SEKJEN/2013 jo SK Sekjen No.711/SEKJEN/2013 yang terakhir dirubah dengan SK Sekjen No. 1268/SEKJEN/2013 tanggal 20 Nopember 2013, yaitu :
 1. Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI pada masa reses dalam satu tahun paling banyak 4 kali dengan ketentuan masing-masing kunjungan kerja 7 kali pertemuan/rapat menjadi paling banyak 10 kali kegiatan (pertemuan/rapat),
 2. Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI untuk 1 tahun sekali kunjungan kerja, dengan ketentuan masing-masing kunjungan kerja paling banyak 5 kali kegiatan (pertemuan/rapat) setiap pelaksanaan kunjungan kerja,
 3. Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI sesuai Tata Tertib DPR RI yaitu 6 kali setahun dengan ketentuan masing-masing kunjungan kerja paling banyak 4 kali kegiatan (pertemuan/rapat) menjadi paling banyak 5 kali kegiatan (pertemuan/rapat).
- Adanya delegasi-delegasi DPR ke sidang-sidang forum regional maupun internasional, antara lain menghadiri sidang ke-21 Asia Pasific Parlimentary Forum (APPF) di Rusia, sidang ke-16 General Assembly of the Asia Pasific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED) di Kathmandu, Nepal, delegasi DPR RI ke Executive Council of Asia Parlimentary Assembly (APA) di Taهران, Iran, delegasi DPR RI ke 5th Asean Inter Parlimentary Assembly (AIPA), delegasi ke-10th AIFOCOM di Bandar Seri Begawan, Brunai Darussalam, kunjungan GKSB DPR RI ke Tunisia dan sebagainya;
- Adanya peningkatan kegiatan pembahasan Rancangan Undang-Undang di Alat Kelengkapan Dewan;

- Adanya peningkatan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2013	TA 2012	Rupiah	%
Belanja Barang Operasional	Rp 874.283.012.406	Rp 638.612.181.693	Rp 235.670.830.713	36,90%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 321.519.061.500	Rp 289.070.701.599	Rp 32.448.359.901	11,22%
Belanja Jasa	Rp 45.358.656.357	Rp 41.134.339.475	Rp 4.224.316.882	10,26%
Belanja Pemeliharaan	Rp 92.666.590.243	Rp 77.193.724.311	Rp 15.472.865.932	20,04%
Belanja Perjalanan	Rp 498.894.844.403	Rp 459.903.510.362	Rp 38.991.334.041	8,47%
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Permda	Rp 47.025.000	Rp -	Rp 47.025.000	0,00%
Realisasi Belanja Bruto	Rp 1.832.769.189.909	Rp 1.505.914.457.440	Rp 326.854.732.469	21,70%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>Rp -19.269.891.488</i>	<i>Rp -16.945.631.502</i>	<i>Rp -2.324.259.986</i>	<i>13,71%</i>
Realisasi Belanja Netto	Rp 1.813.499.298.421	Rp 1.488.968.825.938	Rp 324.530.472.483	21,79%

Dari realisasi belanja pemeliharaan TA 2013 sebesar Rp92.666.590.243,00 terdapat belanja pemeliharaan yang menjadi aset tetap sebesar Rp2.175.889.468,00.

Belanja Modal Rp
34.249.227.610,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp34.249.227.610,00 dan Rp43.156.996.599,00, sehingga terjadi penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.907.768.989,00 atau 20,64 persen antara lain disebabkan menurunnya kegiatan yang membutuhkan tambahan sarana dan prasarana.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012

Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2013	TA 2012	Rupiah	%
B.M. Peralatan dan Mesin	Rp 30.366.564.610	Rp 40.768.937.199	Rp -10.402.372.589	-25,51%
B.M. Gedung dan Bangunan	Rp 929.813.000	Rp 1.821.400.400	Rp -891.587.400	-48,95%
Belanja modal dan jembatan	Rp -	Rp -		
B.M fisik lainnya	Rp 2.952.850.000	Rp 566.659.000	Rp 2.386.191.000	421,09%
Realisasi Belanja Bruto	Rp 34.249.227.610	Rp 43.156.996.599	Rp -8.907.768.989	-20,64%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>Rp -</i>	<i>Rp -</i>	<i>Rp -</i>	<i>-</i>
Realisasi Belanja Netto	Rp 34.249.227.610	Rp 43.156.996.599	Rp -8.907.768.989	-20,64%

Dari realisasi belanja modal TA 2013 sebesar Rp34.249.227.610,00 terdapat belanja sebesar Rp292.356.350,00 yang tidak membentuk aset karena terdefinisi sebagai barang pakai habis.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp
65.743.022.624,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor: NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan BA.002 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp1.131.690.372,00 dan koreksi kurang sebesar Rp7.500.000,00 maka nilai asersi final aset lancar menjadi sebesar Rp65.743.022.624,00 dari sebesar Rp64.618.832.252,00. Sedangkan nilai aset lancar per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp45.970.757.299,00
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar DPR RI per 31 Desember 2013 tersaji pada tabel 14 dibawah ini :

Tabel 14
Rincian Aset Lancar 31 Desember 2013 dan 2012

No.	Aset Lancar	TA 2013		TA 2012
		Unaudited	Audited	
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -	Rp 4.187.884.264
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 731.064	Rp 731.064	Rp 41.098
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 47.917.398.555	Rp 47.918.295.055	Rp 19.461.343.127
4	Piutang Bukan Pajak	Rp 7.462.500	Rp -	Rp 7.431.065.113
5	Bgaian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Rp -	Rp 514.884.861	Rp -
6	Persediaan	Rp 16.693.240.133	Rp 17.309.111.644	Rp 14.890.423.697
	Jumlah	Rp 64.618.832.252	Rp 65.743.022.624	Rp 45.970.757.299

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.187.884.264,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

No	Uraian Eselon I	Per 31 Desember 2013	Per 31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat	Rp -	Rp 3.577.922.564	Rp (3.577.922.564)
2	Dewan	Rp -	Rp 609.961.700	Rp (609.961.700)
	Total	Rp -	Rp 4.187.884.264	Rp (4.187.884.264)

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp
731.064,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp731.064,00 dan Rp41.098,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca (31 Desember 2013).

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 16
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

No.	Uraian Eselon I	Per 31 Desember 2013	Per 31 Desember 2012	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat	Rp 731.064	Rp 41.098	Rp 689.966
2	Dewan	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 731.064	Rp 41.098	Rp 689.966

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara pada bulan Januari 2014 (SSBP terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jasa giro rekening Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp144.814,00 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2014 dengan NTPN 1000110611031306;
- b. Pengembalian belanja berupa honor sebesar Rp586.250,00 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2014 dengan NTPN 1501151003131501.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp
47.918.295.055,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Nomor: NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan BA.002 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp896.500,00 sehingga nilai kas lainnya dan setara kas sesuai asersi final dari sebesar Rp47.917.398.555,00 menjadi sebesar Rp47.918.295.055,00 dan saldo Kas Lainnya sedangkan

Setara Kas per 31 Desember 2012 sebesar Rp19.461.343.127,00, Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Uraian	Jumlah	
		Unaudited	Audited
1	Perjalanan dinas dalam negeri TA 2013 yang belum disetorkan ke Kas Negara	Rp 13.197.158.676	Rp 13.197.158.676
2	Honorarium Tenaga Ahli dan Asisten Pribadi Anggota bulan Desember 2013 yang belum diambil yang bersangkutan	Rp 2.182.002.829	Rp 2.182.002.829
3	Honorarium-honorarium kegiatan bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan	Rp 7.150.304.650	Rp 7.150.304.650
4	Uang lelah, uang transport pegawai bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan	Rp 312.265.000	Rp 312.265.000
5	Uang Makan Nasional bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan dan uang lembur bulan November 2013 yang belum diambil	Rp 669.499.000	Rp 670.395.500
6	Tunjangan-tunjangan anggota dewan bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan	Rp 24.406.168.400	Rp 24.406.168.400
	Jumlah	Rp 47.917.398.555	Rp 47.918.295.055

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

No.	Uraian Eselon I	Jenis Transaksi	Jumlah	Keterangan
1	Eselon I Sekretariat Jenderal	Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam negeri TA 2013 Sater Setjen yang belum di setor ke Kas Negara	Rp 1.318.801.372	Telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 3 Januari 2014 NTPN 0309090810061313
		Honorarium-honorarium kegiatan bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan	Rp 7.150.304.650	telah dibayarkan tanggal 13 Januari 2014 sesuai rekap absensi pegawai
		Uang Makan Nasional bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan dan uang lembur bulan November 2013 yang belum diambil	Rp 670.395.500	telah dibayarkan bulan Januari 2014 sesuai rekap absensi pegawai
		Uang lelah, uang transport pegawai bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan	Rp 312.265.000	telah dibayarkan tanggal 6, 7 Januari 2014
		Jumlah	Rp 9.451.766.522	
2	Eselon I Dewan	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri TA 2013 Sater Dewan yang belum disetor ke Kas Negara	Rp 11.878.357.304	telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 7 Januari 2014 NTPN 0308090804101504
		Tunjangan-tunjangan Anggota Dewan bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan	Rp 24.406.168.400	tunjangan-tunjangan tersebut telah dibayarkan tanggal 3 Januari 2014
		Honorarium Tenaga Ahli bulan Desember 2013 yang belum diambil yang bersangkutan	Rp 1.790.066.470	terdapat 248 orang yang belum mengambil honorarium s.d. 31 Desember 2013 @ Rp7.500.000,- (bruto)
		Honorarium Asisten Pribadi Anggota bulan Desember 2013 yang belum diambil yang bersangkutan	Rp 391.936.359	terdapat 102 orang yang belum mengambil honorarium s.d. 31 Desember 2013 @ Rp3.900.000,- (bruto)
		Jumlah	Rp 38.466.528.533	
	Total		Rp 47.918.295.055	

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp0,00

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Nomor: NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 terdapat koreksi kurang sebesar Rp7.500.000,00 sehingga saldonya menjadi Rp0,00. Sedangkan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp7.468.407.149,00, Piutang Bukan Pajak merupakan hal atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I

No	Unit Eselon I	TA 2013		TA 2012
		Unaudited	Audited	
1	Sekretariat	Rp 7.500.000	Rp -	Rp 7.468.407.149
2	Dewan	Rp -	Rp -	0
	Jumlah	Rp 7.500.000	Rp -	Rp 7.468.407.149

Sedangkan mutasi piutang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	7.468.407.149
Mutasi Tambah :		
- Koreksi piutang PT. PP sesuai verifikasi BPKP	Rp	102.520.669
	Rp	<u>7.570.927.818</u>
Mutasi berkurang :		
- Pembayaran angsuran piutang PT. PP	Rp	1.342.679.762
- Pelunasan piutang sewa gedung	Rp	62.500.000
- Pembayaran angsuran piutang PT. PP	Rp	3.966.277.533
- Hasil verifikasi BPKP	Rp	2.199.470.523
	Rp	<u>7.570.927.818</u>
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	-

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi tambah terdiri dari :
 1. Piutang sewa gedung dan bangunan yang belum tertagih a.n. PT. BNI sebesar Rp7.500.000,00 ternyata telah disetor pada tanggal 28 Maret 2014 dengan NTPN 021020703130611 sesuai dengan Nota Kesepakatan

Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Nomor: NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014;

2. Koreksi piutang PT. PP sesuai verifikasi BPKP yang merupakan PPN yang sudah dipunggut sebesar Rp102.520.669,00 sesuai dengan Berita Acara perhitungan nilai tagihan PT. PP dalam tripartit atas Laporan Keuangan tahun 2011.

- Mutasi pengurangan tersebut terdiri dari :

1. Pembayaran angsuran piutang PT. PP atas pekerjaan Ruang Rapat Banggar Gedung Nusantara II DPR RI sebesar Rp1.342.679.762,00 tanggal 29 Mei 2013 dengan NTPN 1107070909070608;
2. Pelunasan piutang sewa tanah, gedung dan bangunan a.n. PT. BNI sebesar Rp62.500.000,00 yaitu piutang sewa periode 1 Agustus 2012 s.d. 31 Desember 2012 (5/12 x Rp150.000.000,00) yang dibayarkan tanggal 14 Februari 2013 dengan NTPN 0705120012071009;
3. Pelunasan piutang PT. PP atas pekerjaan Ruang Rapat Banggar Gedung Nusantara II DPR RI sebesar Rp3.966.277.533,00 tanggal 17 September 2013 dengan NTPN 0712070201070313;
4. Nilai wajar tagihan barang pengganti dan *cancellation fee* yang berasal dari penarikan dan penggantian komponen barang impor/luar negeri dengan barang lokal dalam pekerjaan perbaikan Ruang Rapat Banggar Gedung Nusantara II DPR RI sebesar Rp2.199.470.523,00 sebagaimana laporan hasil verifikasi BPKP atas pekerjaan dimaksud No. LEV-66/D202/2013.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak (Rp0,00)*

C.1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Nomor: NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 terdapat koreksi bertambah sebesar Rp37.000,00 sehingga saldo penyisihan piutang tak tertagih menjadi Rp0,00. Sedangkan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2012 adalah minus Rp37.342.036,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 20
Penyisihan Piutang Tak tertagih-Piutang Bukan Pajak

No.	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	Rp -	0,5%	Rp -
Total			Rp -		Rp -

Bagian Lancar
TP/TGR
Rp517.472.222,00

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Nomor NK. 070/P.B.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi pada tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp517.472.222,00 sehingga saldonya menjadi sebesar Rp517.472.222,00. Sedangkan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 tersaji pada tabel 21.

Tabel 21
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Satker	TA 2013	TA 2012
1	Setjen	Rp 517.472.222	Rp -
Jumlah		Rp 517.472.222	Rp -

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	-
Mutasi tambah :		
- Bagian Lancar TP/TGR PNBPN yang belum disetorkan ke Kas Negara	Rp	517.472.222
	Rp	<u>517.472.222</u>
Mutasi kurang :		
-	Rp	-
	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	<u>517.472.222</u>

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Bag. Lancar TP/TGR (Rp2.587.361,00)

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.587.361,00.

Penyisihan piutang tak tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian estimasi penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada tabel 22 berikut ini :

Tabel 22
Rincian Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyusutan
Setjen	Lancar	Rp 517.472.222	0,50%	Rp 2.587.361
Jumlah				Rp 2.587.361

Persediaan Rp 17.309.111.644,00

C.1.8. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Nomor: NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp615.871.511,00 sehingga nilai asersi final menjadi sebesar Rp17.309.111.644,00 dari nilai sebesar Rp16.693.240.133,00. Sedangkan nilai persediaan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp14.890.423.697,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran Persediaan disajikan sebesar harga perolehan

persediaan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Harga yang digunakan untuk menghitung nilai perolehan pada barang persediaan adalah harga pembelian terakhir.

Laporan Barang Persediaan DPR RI berdasarkan data yang diterima oleh Bagian Perbendaharaan dari Unit Akuntansi Pembantu (UAKPPB) dari Bagian Perlengkapan, Bagian Pelayanan Kesehatan, Bagian Pemberitaan, Bagian Perpustakaan, Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI, Bagian Gedung dan Pertamanan, Bagian Kendaraan serta Bagian Instalasi

Berdasarkan opname fisik di Bagian Perlengkapan yang dilakukan kembali pada tanggal 2 dan 3 April 2014 secara menyeluruh oleh Bagian Perbendaharaan dan Bagian Pengawasan Internal yang didampingi oleh Tim BPK RI karena opname fisik pada awal bulan Januari 2014 dilakukan dengan metode sampling, maka nilai asersi final persediaan per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp17.309.111.644,00 dan terdapat persediaan dalam kondisi rusak/usang sebesar Rp893.784.154,00

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan per Desember 2012 tersaji dalam tabel 23 berikut ini :

Tabel 23
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2013 dan Per 31 Desember 2012

No.	Uraian	Per 31 Desember 2013		Per 31 Desember 2012
		Unaudited	Audited	
1	Barang Konsumsi	Rp 10.886.546.209	Rp 11.519.262.030	Rp 8.488.704.230
2	Barang untuk Pemeliharaan	Rp 1.211.829.046	Rp 1.194.984.736	Rp 923.417.330
3	Suku Cadang	Rp 353.132.255	Rp 353.132.255	Rp 293.185.883
4	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	Rp 2.640.806.564	Rp 2.640.806.564	Rp 3.690.898.970
5	Bahan Baku	Rp 145.209.096	Rp 145.209.096	Rp 153.322.465
6	Persediaan Lainnya	Rp 1.455.716.963	Rp 1.455.716.963	Rp 1.340.894.819
	Jumlah	Rp 16.693.240.133	Rp 17.309.111.644	Rp 14.890.423.697

Jumlah persediaan yang rusak/usang sebesar Rp893.784.154,00 terdiri dari:

- Persediaan bagian Perlengkapan sebesar Rp891.110.154,00 terdiri dari:

- 1) Persediaan sebesar Rp812.744.145,00 berupa Buku Alamat DPR RI, Buku Kerja DPR RI, Buku Saku DPR RI, Kalender Dinding DPR RI dan Kalender

Meja DPR RI tahun 2013, berbagai jenis kertas, tinta cetak, bahan cetak lainnya, pita komputer, tinta/toner printer yang sudah tidak digunakan lagi dikarenakan unit kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sudah tidak menggunakan barang-barang tersebut.

- 2) Persediaan sebesar Rp78.366.009,00 berupa batu baterai yang sudah tidak bisa dimanfaatkan serta Buku Alamat, Buku Kerja, Buku Saku, Kalender Dinding dan Kalender Meja tahun 2009 – 2012.
- Persediaan bagian Gedung dan Pertamanan sebesar Rp2.674.000,00 berupa beberapa obat-obatan rusa yang sudah kadaluwarsa.

Barang persediaan yang rusak/usang tersebut belum dilakukan proses penghapusan dan akan ditindak lanjuti pada Semester I Tahun Anggaran 2014.

Penatausahaan barang persediaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI kurang tertib dan masih terkendala dengan keterbatasan gudang tempat penyimpanan, khususnya di Bagian Perlengkapan yang tidak bisa menampung banyaknya jenis barang persediaan sehingga menyulitkan saat opname fisik. Penertiban penatausahaan tersebut akan ditindaklanjuti pada Semester I Tahun Anggaran 2014.

Mutasi persediaan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	14.890.423.697
Mutasi tambah :		
- Pembelian	Rp	3.476.893.722
	Rp	18.367.317.419
Mutasi kurang :		
- Habis pakai	Rp	1.058.205.775
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	17.309.111.644

Aset Tetap

Rp

1.283.092.150.051,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA. 002) Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi bertambah sebesar Rp5.093.514.529,00 dan koreksi berkurang sebesar Rp1.003.006.391,00 sehingga nilai asersi final menjadi sebesar Rp1.283.092.150.051,00 dari sebesar Rp1.279.001.641.913,00. Sedangkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.039.975.897.857,00. Aset Tetap merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebagaimana pada tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Aset Tetap DPR RI

No	Uraian	Per 31 Desember 2013		Per 31 Desember 2012
		Unaudited	Audited	
1	Tanah	Rp 188.409.157.000	Rp 188.409.157.000	Rp 188.409.157.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 633.300.165.677	Rp 634.196.973.114	Rp 602.864.782.648
3	Gedung dan Bangunan	Rp 809.022.958.706	Rp 811.031.260.536	Rp 808.549.785.883
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 66.863.765.096	Rp 67.937.884.595	Rp 64.901.869.781
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 369.867.366.353	Rp 370.981.600.642	Rp 371.207.967.145
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 4.360.968.400	Rp 4.360.968.400	Rp 4.042.335.400
Nilai Perolehan		Rp 2.071.824.381.232	Rp 2.076.917.844.287	Rp 2.039.975.897.857
Akumulasi Penyusutan		Rp -792.822.739.319	Rp -793.825.694.236	Rp -
Nilai Buku Aset Tetap		Rp 1.279.001.641.913	Rp 1.283.092.150.051	Rp 2.039.975.897.857

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat dalam tabel 25 dibawah ini :

Tabel 25
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2013 Audited

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	Rp 188.409.157.000	Rp 188.409.157.000	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 634.196.973.114	Rp 634.196.973.114	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp 811.031.260.536	Rp 811.031.260.536	Rp -
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 67.937.884.595	Rp 67.937.884.595	Rp -
5	Aset Tetap dalam Renovasi	Rp -	Rp 352.417.962.054	Rp (352.417.962.054)
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 370.981.600.642	Rp 3.576.984.731	Rp 367.404.615.911
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 4.360.968.400	Rp 4.360.968.400	Rp -
Nilai Perolehan		Rp 2.076.917.844.287	Rp 2.061.931.190.430	Rp 14.986.653.857
Akumulasi Penyusutan		Rp (793.825.694.236)	Rp (793.825.694.236)	Rp -
Nilai Buku Aset Tetap		Rp 1.283.092.150.051	Rp 1.268.105.496.194	Rp 14.986.653.857

Pada Aset Tetap terdapat perbedaan pencatatan antara SAK dan SIMAK-BMN sebesar Rp14.986.653.857,00. Nilai tersebut merupakan nilai pengembangan atas tanah perkantoran DPR RI seluas 404.823 m² yang tercatat sebagai hak milik Yayasan Gelora Bung Karno. Nilai tanah bangunan kantor DPR RI berdasarkan Nota Kesepakatan Tripartit No. 023/PB.6.4./2009, 15 April 2010 harus direklasifikasi dari aset

tanah. Permohonan Pelepasan Hak Penggunaan Lahan (HPL) sampai saat ini masih dalam proses.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp
188.409.157.000,00

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki DPR RI per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp188.409.157.000,00 dan Rp188.409.157.000,00.

Saldo Tanah pada DPR RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp188.409.157.000,00 dengan luas 126.516 m². Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2013 sebesar Rp188.409.157.000,00 seluas 126.516 m², koreksi tambah sebesar Rp4.068,00 yang merupakan koreksi pencatatan nilai perolehan tahun 2012 yang tercatat Rp1.829.978.892,00 dengan luas 5.292 m² seharusnya Rp1.829.982.960,00 dengan luas yang sama dan tidak terdapat mutasi kurang.

Rincian saldo tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Saldo Tanah

NO	KIB	LUAS	NILAI
1	1	20.000 m2	73.260.000.000
2	1	9.438 m2	16.327.740.000
3	2	16.229 m2	36.206.899.000
4	3	7.711 m2	15.938.637.000
5	4	5.143 m2	5.297.290.000
6	5	11.481 m2	12.755.391.000
7	6	2.120 m2	2.287.480.000
8	1	30.000 m2	15.960.000.000
9	2	62 m2	82.900.000
10	3	14.000 m2	6.720.000.000
11	4	5.040 m2	1.742.841.108
12	5	514 m2	177.741.714
13	6	4.778 m2	1.652.237.178
	JUMLAH	126.516 m2	188.409.157.000

Sesuai audit BPK atas Laporan Keuangan tahun 2012, bahwa dalam aset tanah senilai Rp188.409.157.000,00 seluas 126.516 m² terdapat aset tanah seluas 62 m² dengan nilai Rp82.900.000,00 yang merupakan jalan masuk ke Wisma Griya Sabha Kopo yang diperoleh dengan pembelian tahun 1994. Hasil IP yang semula tidak memiliki bukti kepemilikan sudah mendapat pengakuan dengan dikeluarkannya surat pernyataan dari Lurah setempat yang menyatakan tanah tersebut benar dibeli oleh pihak DPR RI.

Peralatan dan
Mesin Rp
634.196.973.114,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA. 002) Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp896.807.437,00 maka nilai asersi final menjadi sebesar Rp634.196.973.114,00 dari sebesar Rp633.300.165.677,00. Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp602.864.782.648,00. Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp476.259.993.161,00 menjadi sebesar Rp157.936.979.953,00

Dari realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp30.366.564.610,00 yang menjadi aset peralatan dan mesin sebesar Rp27.098.467.927,00. Sedangkan yang menjadi jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp1.897.998.233,00, aset tak berwujud sebesar Rp955.227.000,00, gedung dan bangunan sebesar Rp25.316.000,00 dan konstruksi dalam pengerjaan Rp122.316.000,00, serta terdefinisi sebagai barang ekstrakomptabel Rp3.810.900,00. Belanja sebesar Rp263.428.550,00 tidak menjadi aset peralatan dan mesin karena terdefinisi sebagai barang pakai habis. Dilain pihak, belanja pemeliharaan yang menjadi aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.341.543.468,00.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	602,864,782,648
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	Rp	29,081,155,154
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp	144,927,350
- Pengembangan nilai aset	Rp	1,539,429,319
- Perolehan lainnya	Rp	2,098,751,843
- Reklasifikasi dari aset lain-lain	Rp	147,120,435
	Rp	33,011,384,101
Mutasi Kurang :		
- Penghentian Aset dari penggunaan	Rp	-910,544,950
- Penghapusan	Rp	-209,500,000
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp	-558,428,685
- Transaksi normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-720,000
	Rp	-1,679,193,635
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	634,196,973,114
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Rp	-476,259,993,161
Nilai buku per 31 Desember 2013	Rp	157,936,979,953

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa :

a. Transaksi penambahan dari pembelian sebesar Rp29.081.155.154,00, terdiri dari :

No	Uraian	Volume	Jumlah
1	Alat bantu	3 unit	Rp 526.098.000
2	Alat angkutan darat bermotor	1 unit	Rp 466.000.000
3	Alat angkutan darat tak bermotor	1 unit	Rp 715.000
4	Alat bengkel bermesin	4 unit	Rp 38.280.000
5	Alat bengkel tak bermesin	2 buah	Rp 1.837.000
6	Alat ukur	53 buah	Rp 219.263.000
7	Alat pengolahan	6 buah	Rp 48.840.000
8	Alat kantor	507 buah	Rp 6.480.583.844
9	Alat rumah tangga	1.644 buah	Rp 5.106.407.182
10	Alat studio	252 buah	Rp 1.781.675.406
11	Alat komunikasi	51 buah	Rp 195.085.000
12	Peralatan pemancar	38 buah	Rp 510.411.000
13	Alat kedokteran	37 buah	Rp 633.309.400
14	Alat kesehatan umum	8 buah	Rp 5.268.599.000
15	Unit alat laboratorium	3 buah	Rp 12.540.000
16	Peralatan laboratorium hydrodinamica	4 buah	Rp 111.090.500
17	Komputer unit	175 unit	Rp 2.500.570.577
18	Peralatan komputer	361 buah	Rp 4.776.287.745
19	Alar sar	33 buah	Rp 60.885.000
20	Unit peralatan proses/produksi	8 buah	Rp 285.131.000
21	Rambu-rambu lalu lintas darat	59 buah	Rp 57.546.500
	Jumlah	3.250 unit/buah	Rp 29.081.155.154

b. Transaksi penambahan berupa pengembangan nilai aset sebesar Rp1.539.429.319,00, terdiri dari :

1	Alat bantu	Rp 1.138.930.000
2	Alat angkutan darat bermotor	Rp 89.679.215
3	Alat bengkel bermesin	Rp 21.949.000
4	Alat kantor	Rp 53.000.000
5	Alat rumah tangga	Rp 5.067.104
6	Alat kesehatan umum	Rp 11.400.000
7	Peralatan laboratorium hydrodinamica	Rp 630.000
8	Komputer unit	Rp 4.620.000
9	Peralatan komputer	Rp 212.894.000
10	Unit peralatan proses/produksi	Rp 1.260.000
	Jumlah	Rp 1.539.429.319

c. Transaksi penambahan berupa koreksi tambah pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp144.927.350,00, terdiri dari:

1	Alat ukur	Rp 1.260.000
2	Alat kantor	Rp 4.270.385
3	Alat rumah tangga	Rp 104.692.520
4	Alat studio	Rp 121.155
5	Peralatan pemancar	Rp 484.620
6	Peralatan laboratorium hydrodinamica	Rp 290.769
7	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp 209
8	Komputer unit	Rp 5.700.000
9	Peralatan Komputer	Rp 27.720.000
10	Unit peralatan proses/produksi	Rp 387.692
	Jumlah	Rp 144.927.350

- d. Transaksi penambahan dari perolehan lainnya yang merupakan hasil verifikasi BPKP atas tagihan barang pengganti dan *cancellation fee* pekerjaan perbaikan Ruang Rapat Badan Anggaran Gedung Nusantara II DPR RI No. LEV-66/D202/2013 tanggal 31 Mei 2013, terdiri dari:

1	Penerangan dan instalasi listrik	2 buah	Rp	14.891.108
2	Delegate Ruang Sidang	47 buah	Rp	789.233.036
3	Alat studio lainnya	8 buah	Rp	61.178.592
4	Unit power supply	3 buah	Rp	198.138.122
5	Kursi pimpinan	4 buah	Rp	23.396.965
6	Kursi sidang	173 buah	Rp	1.011.914.020
	Jumlah	237 buah	Rp	2.098.751.843

- e. Transaksi penambahan sebesar Rp147.120.435,00 berupa reklasifikasi dari aset lain-lain yaitu belanja modal yang dikategorikan aset lain-lain tahun 2007 sebesar Rp91.850.000,00, tahun 2008 sebesar Rp11.983.345,00 dan tahun 2009 sebesar Rp43.287.090,00, setelah dilakukan penelusuran dokumen-dokumen pendukung menambah nilai aset peralatan dan mesin.

- f. Transaksi pengurangan peralatan dan mesin terdiri dari :
- Penghapusan alat angkutan darat bermotor sebesar Rp209.500.000,00 sesuai SK Sekjen No. 647/SEKJEN/2009 dalam SIMAK-BMN baru dihapus tahun 2013;
 - Penghentian aset dari penggunaan berupa alat angkutan darat bermotor sebesar Rp910.544.950,00 sesuai dengan usulan penghapusan Surat Usulan Ijin Penghapusan BMN No. SJ/11056/SETJEN DPR RI/KU.02/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan serta diputuskan dengan SK Sekjen No. 116/SEKJEN/2014 tanggal 7 Januari 2014.
 - Koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp558.428.685,00 terdiri dari :

1	Alat bantu	Rp	17.651.855
2	Alat kantor	Rp	160.481.138
3	Alat rumah tangga	Rp	374.852.654
4	Unit alat laboratorium kimia nuklir	Rp	5.072.723
5	Rambu-rambu lalu lintas darat	Rp	370.315
	Jumlah	Rp	558.428.685

- Normalisasi BMN Aset Tetap Alat Kantor sebagai tindak lanjut atas migrasi penyusutan semester I TA 2013 sebesar Rp720.000,00.

Rincian penyusutan Peralatan dan Mesin Intrakomptabel

disajikan dalam tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomptabel
per 31 Desember 2013

Kode BMN	Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Masa Manfaat (Tahun)	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2013
3.01.03	Alat Bantu	7	unit	262	24.340.585.377	18.195.365.921	6.145.219.456
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	unit	238	27.004.104.565	20.487.162.408	6.516.942.157
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	unit	533	930.020.470	910.687.970	19.332.500
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10	buah	45	14.845.792.620	8.766.592.395	6.079.200.225
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	buah	85	632.447.318	610.563.253	21.884.065
3.03.03	Alat Ukur	5	buah	136	524.763.822	297.389.510	227.374.312
3.04.01	Alat Pengolahan	4	buah	142	459.948.000	417.213.000	42.735.000
3.05.01	Alat Kantor	5	buah	26.774	138.665.079.951	101.748.216.757	36.916.863.194
3.05.02	Alat Rumah Tangga	5	buah	101.411	257.770.993.888	203.568.461.527	54.202.532.361
3.06.01	Alat Studio	5	buah	3.200	27.262.898.822	21.238.166.322	6.024.732.500
3.06.02	Alat Komunikasi	5	buah	3.646	11.921.321.517	10.046.099.133	1.875.222.384
3.06.03	Peralatan Pemancar	10	buah	121	4.925.901.406	3.041.821.523	1.884.079.883
3.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	buah	20	97.900.000	9.790.020	88.109.980
3.07.01	Alat Kedokteran	5	buah	491	6.175.120.178	4.648.775.454	1.526.344.724
3.07.02	Alat Kesehatan Umum	5	buah	105	6.902.882.000	2.150.882.900	4.751.999.100
3.08.01	Unit Alat laboratorium	8	buah	172	8.796.343.992	4.373.551.722	4.422.792.270
3.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	buah	558	4.318.358.308	1.417.153.242	2.901.205.066
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	buah	34	3.843.384.376	1.411.126.044	2.432.258.332
3.08.04	Alat Proteksi Radiasi /Proteksi Lingkungan	10	buah	52	202.883.792	51.545.999	151.337.793
3.08.05	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10	buah	2	977.020.000	732.765.000	244.255.000
3.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	buah	105	1.696.361.500	921.943.970	774.417.530
3.08.07	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	buah	76	3.944.863.067	1.289.518.293	2.655.344.774
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	buah	2	5.098.486	1.274.620	3.823.866
3.09.01	Senjata Api	10	buah	5	229.998.200	158.998.650	70.999.550
3.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3	buah	326	213.228.147	191.367.491	21.860.656
3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4	buah	7	17.886.666	9.254.168	8.632.498
3.10.01	Komputer Unit	4		3.659	48.413.581.913	40.947.907.628	7.465.674.285

Kode BMN	Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Masa Manfaat (Tahun)	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2013
3.10.02	Peralatan Komputer	4	buah	6.087	35.305.763.876	25.779.277.904	9.526.485.972
3.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5	buah	1	3.025.000	1.512.500	1.512.500
3.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	buah	3	652.944.580	163.236.146	489.708.434
3.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	15	buah	3	103.485.000	90.289.200	13.195.800
3.15.03	Alat SAR	2	buah	38	65.210.640	18.465.480	46.745.160
3.17.01	Unit Peralatan Proses /Produksi	8	buah	12	307.292.692	33.677.043	273.615.649
3.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7	buah	68	1.646.990.645	1.558.101.001	88.889.644
3.19.01	Peralatan Olahraga	3	buah	26	993.492.300	971.838.967	21.653.333
Jumlah			unit/ buah	148.445	634.196.973.114	476.259.993.161	157.936.979.953

Dalam aset peralatan dan mesin terdapat aset yang dikategorikan barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.246.331.599,00 dengan kuantitas 13.582 unit/buah. Saldo tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2013 sebesar Rp2.208.993.034,00 dengan kuantitas 13.441 unit/buah, mutasi tambah sebesar Rp37.338.565,00 dengan kuantitas 141 buah, dan tidak terdapat mutasi kurang. Mutasi tambah tersebut merupakan pembelian yang terdiri dari:

1	Alat bengkel tak bermesin	1 buah	Rp	247.500
2	Alat kantor	51 buah	Rp	14.025.000
3	Alat rumah tangga	64 buah	Rp	16.510.665
4	Alat studio	8 buah	Rp	1.980.000
5	Alat kedokteran	16 buah	Rp	4.378.000
6	Peralatan komputer	1 buah	Rp	197.400
Jumlah		141 buah	Rp	37.338.565

Mutasi nilai peralatan dan mesin ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	2.208.993.034
Mutasi bertambah :		
- Pembelian	Rp	37.338.565
	Rp	2.246.331.599
Mutasi berkurang :		
- -	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	2.246.331.599
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Rp	-1.958.986.710
Nilai buku per 31 Desember 2013	Rp	287.344.889

Nilai perolehan aset peralatan dan mesin ekstrakomptabel per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.246.331.599,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.958.986.710,00 sehingga nilai buku peralatan dan mesin ekstrakomptabel per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp287.344.889,00.

Rincian penyusutan peralatan dan mesin ekstrakomptabel disajikan dalam tabel 28 berikut ini :

Tabel 28
Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel Per 31 Desember 2013

Kode BMN	Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Masa Manfaat (Tahun)	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2013
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	buah	23	3.877.500	2.601.500	1.276.000
3.05.01	Alat Kantor	5	buah	950	165.160.600	138.183.101	26.977.499
3.05.02	Alat Rumah Tangga	5	buah	7.630	1.438.271.715	1.339.097.188	99.174.527
3.06.01	Alat Studio	5		2.335	56.707.200	46.811.820	9.895.380
3.06.02	Alat Komunikasi	5	buah	1.324	321.040.644	223.495.322	97.545.322
3.07.01	Alat Kedokteran	5	buah	153	41.614.200	36.229.700	5.384.500
3.10.02	Peralatan Komputer	4		1.042	151.281.100	129.474.650	21.806.450
3.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7	buah	125	68.378.640	43.093.429	25.285.211
Jumlah			buah	13.582	2.246.331.599	1.958.986.710	287.344.889

Gedung dan Bangunan Rp 811.031.260.536,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA. 002) Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp2.008.301.830,00 yang merupakan reklas dari aset lain-lain sehingga nilai asersi final Gedung dan Bangunan menjadi sebesar Rp811.031.260.536,00 dari sebesar Rp809.022.958.706,00. Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp808.549.785.883,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp294.321.688.597,00 menjadi sebesar Rp516.709.571.939,00.

Dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp929.813.000,00, yang menjadi aset gedung dan bangunan sebesar Rp865.425.896,00 dan nilai sebesar Rp64.387.104,00 menjadi aset peralatan dan mesin. Selain itu, belanja pemeliharaan yang menjadi aset gedung dan bangunan sebesar Rp448.071.000,00.

Mutasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp 808.549.785.883
Mutasi bertambah :	
- Penambahan saldo awal	Rp 152.337.000
- Pengembangan nilai aset	Rp 1.328.032.896
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp 2.019.081.830
	<u>Rp 3.499.451.726</u>
	Rp 812.049.237.609
Mutasi berkurang :	
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp -157.879.073
- Transaksi normalisasi BMN Aset Tetap	Rp -146.280.000
- Reklasifikasi keluar	Rp -713.818.000
	<u>Rp -1.017.977.073</u>
Saldo per 31 Desember 2013	Rp 811.031.260.536
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Rp -294.321.688.597
Nilai buku per 31 Desember 2013	<u>Rp 516.709.571.939</u>

Transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

- a. Transaksi penambahan berupa penambahan saldo awal sebesar Rp152.337.000,00 pada bangunan gedung tempat kerja merupakan hasil normalisasi data dengan adanya aplikasi migrasi penyusutan BMN aset tetap pada Semester I TA 2013;
- b. Transaksi penambahan berupa pengembangan nilai aset sebesar Rp1.328.032.896,00 terdiri dari :

1.	Bangunan gedung tempat kerja	Rp 1.271.932.896
2.	Bangunan gedung tempat tinggal	Rp 56.100.000
	Jumlah	Rp 1.328.032.896

- c. Transaksi penambahan berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp2.019.081.830,00 merupakan koreksi pencatatan bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp10.780.000,00 dan reklas dari aset lain-lain, yaitu belanja modal yang teridentifikasi sebagai aset lain-lain tahun 2008 sebesar Rp2.209.830,00 dan tahun 2009 sebesar Rp2.006.092.000,00, setelah dilakukan penelusuran dokumen-dokumen pendukung untuk mengoreksi nilai aset gedung dan bangunan tersebut;
- d. Transaksi pengurangan berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp157.879.073,00 terdiri dari :

1.	Bangunan gedung tempat kerja	Rp	113.291.240
2.	Bangunan gedung tempat tinggal	Rp	44.587.833
	Jumlah	Rp	157.879.073

- e. Transaksi pengurangan berupa normalisasi BMN aset tetap sebesar Rp146.280.000,00 merupakan normalisasi dari pemberlakuan aplikasi migrasi penyusutan BMN aset tetap pada semester I TA 2013 yaitu Gedung Mekanik yang dalam kondisi rusak berat;
- f. Transaksi pengurangan berupa reklasifikasi keluar sebesar Rp713.818.000,00 berupa aset bangunan olah raga terbuka permanen yang sudah diinput (*double* pencatatan) sesuai BA.05 berdasarkan Inventarisasi dan Penilaian Aset (IP) tahun 2009.

Rincian penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dapat disajikan dalam tabel 29 berikut ini:

Tabel 29
Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Intrakomptabel
Per 31 Desember 2013

Kode BMN	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Nilai Buku per 31 Desember 2013
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	unit	90	764.832.828.857	282.247.340.446	482.585.488.411
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinoaal	50	unit	130	42.712.230.679	11.384.647.891	31.327.582.788
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	50	unit	10	3.486.201.000	689.700.260	2.796.500.740
	Jumlah		unit	230	811.031.260.536	294.321.688.597	516.709.571.939

Dalam aset tetap gedung dan bangunan terdapat aset yang dikategorikan ekstrakomptabel per 31 Desember 2013 sebesar Rp502.601.780,00 dengan kuantitas 789 unit. Saldo tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2013 sebesar Rp508.658.780,00 dengan kuantitas 789 unit, dan mutasi kurang sebesar Rp6.057.000,00, yaitu koreksi normalisasi BMN gedung mekanik yang rusak berat karena diberlakukannya penyusutan aset tetap pada semester I TA 2013.

Kenaikan/penurunan nilai aset tetap gedung dan bangunan ekstrakomptabel sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	508.658.780
Mutasi bertambah :		
- -	Rp	-
	Rp	508.658.780
Mutasi berkurang :		
- Transaksi normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-6.057.000
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	502.601.780
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Rp	-34.354.453
Nilai buku per 31 Desember 2013	Rp	468.247.327

Nilai perolehan aset gedung dan bangunan ekstrakomptabel per 31 Desember 2013 sebesar Rp502.601.780,00 dengan terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp34.354.453,00 sehingga nilai buku gedung dan bangunan ekstrakomptabel per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp468.247.327,00.

Rincian penyusutan aset tetap gedung dan bangunan ekstrakomptabel dapat disajikan dalam tabel 30 sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Ekstrakomptabel
Per 31 Desember 2013

Kode BMN	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Nilai Buku per 31 Desember 2013
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	unit	1	2.839.000	596.190	2.242.810
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	50	unit	788	499.762.780	33.758.263	466.004.517
Jumlah			unit	789	502.601.780	34.354.453	468.247.327

Jalan, irigasi dan jaringan Rp 67.937.884.595,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA. 002) Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp1.074.119.778,00 dan koreksi kurang sebesar Rp279,00 sehingga nilai asersi final menjadi sebesar Rp67.937.884.595,00 dari sebesar Rp66.863.765.096,00. Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp64.901.869.781,00. Sedangkan nilai buku

jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2013 yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp23.244.012.478,00 menjadi sebesar Rp44.693.872.117,00. Selain itu belanja pemeliharaan yang membentuk aset jalan adalah sebesar Rp818.287.690,00. Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.887.856.694,00.

Mutasi transaksi aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	64.901.869.781
Mutasi tambah :		
- Pembelian	Rp	2.077.814.694
- Pengembangan nilai aset	Rp	6.440.000
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp	3.701.539
- Perolehan lainnya	Rp	628.329.690
- Reklasifikasi dari aset lain-lain	Rp	445.790.088
	Rp	<u>3.162.076.011</u>
	Rp	68.063.945.792
Mutasi kurang :		
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp	<u>-126.061.197</u>
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	67.937.884.595
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Rp	<u>-23.244.012.478</u>
Nilai Buku per 31 Desember 2013	Rp	<u>44.693.872.117</u>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

a. Transaksi penambahan berupa pembelian sebesar Rp2.077.814.694,00 terdiri dari:

1	Jalan	1	Rp	189.958.000
2	Instalasi gardu listrik	8 unit	Rp	672.163.800
3	Instalasi lain	15 unit	Rp	188.016.500
4	Jaringan listrik	12	Rp	979.759.894
5	Jaringan gas	3	Rp	47.916.500
	Jumlah	39 unit	Rp	2.077.814.694

b. Transaksi penambahan berupa pengembangan nilai aset sebesar Rp6.440.000,00 merupakan pengembangan instalasi gardu listrik;

c. Transaksi penambahan berupa koreksi tambah pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp3.701.539,00 terdiri dari :

1	Instalasi gardu listrik	Rp	1.860.000
2	Instalasi lain	Rp	1.260.000
3	Jaringan Listrik	Rp	290.769
4	Jaringan gas	Rp	290.770
	Jumlah	Rp	3.701.539

- d. Transaksi penambahan berupa perolehan lainnya sebesar Rp628.329.690,00 merupakan perolehan jalan;
- e. Transaksi penambahan sebesar Rp445.790.088,00 berupa reklasifikasi dari aset lain-lain, yaitu belanja modal yang dikategorikan sebagai aset lain-lain tahun 2007 sebesar Rp358.182.000,00; tahun 2008 sebesar Rp1.473.220,00 dan tahun 2009 sebesar Rp86.134.868,00 setelah dilakukan penelusuran dokumen untuk menambah nilai aset jalan, jaringan dan irigasi;
- f. Transaksi pengurangan berupa koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp126.061.197,00 terdiri dari :

1	Jembatan	Rp	11.285.028
2	Instalasi air bersih/air baku	Rp	17.658.050
3	Instalasi air kotor	Rp	26.241.408
4	Instalasi pengamam	Rp	3.492.346
5	Instalasi lain	Rp	15.525.518
6	Jaringan listrik	Rp	45.251.655
7	Jaringan telepon	Rp	6.607.192
	Jumlah	Rp	126.061.197

Rincian penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat disajikan dalam tabel 31 berikut ini:

Tabel 31
Rincian Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2013

Kode BMN	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Nilai Buku per 31 Desember 2013
5.01.01	Jalan	10	m ²	24	15.553.864.620	11.052.383.679	4.501.480.941
5.01.02	Jembatan	50	m ³	1	2.411.364.980	168.795.549	2.242.569.431
5.02.01	Bangunan Air Irigasi	50	unit	2	330.926.000	38.378.380	292.547.620
5.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	unit	1	1.013.928.610	111.532.147	902.396.463
5.02.07	Bangunan Air Kotor	50	unit	4	1.321.954.000	264.355.570	1.057.598.430
5.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30		4	6.607.961.009	1.763.115.783	4.844.845.226
5.03.02	Instalasi Air Kotor	30		12	8.281.632.102	1.902.235.314	6.379.396.788
5.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	unit	7	3.892.424.000	1.362.348.402	2.530.075.598
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40	unit	27	4.505.301.800	247.558.165	4.257.743.635
5.03.09	Instalasi Pengaman	20	unit	1	746.238.261	130.591.697	615.646.564
5.03.10	Instalasi Lain	5		4.720	5.402.575.954	3.551.081.297	1.851.494.657
5.04.01	Jaringan Air Minum	30		1	475.088.000	102.935.733	372.152.267
5.04.02	Jaringan Listrik	40		141	15.934.604.761	2.300.829.994	13.633.774.767
5.04.03	Jaringan Telepon	20	unit	2	1.411.813.228	247.067.314	1.164.745.914
5.04.04	Jaringan Gas	30		3	48.207.270	803.454	47.403.816
	Jumlah		m ² /unit	4.950	67.937.884.595	23.244.012.478	44.693.872.117

Aset Tetap Lainnya
Rp
370.981.600.642,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Kesepakatan Perubahan Angka BA.002 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp1.114.285.289,00 dan mutasi kurang sebesar Rp51.000,00 sehingga nilai asersi final aset tetap lainnya menjadi sebesar Rp370.981.600.642,00 dari sebesar Rp369.867.366.353,00. Sedangkan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp371.207.967.145,00. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap lainnya di DPR RI berupa koleksi barang perpustakaan dan budaya, serta Aset Tetap Renovasi (pengembangan aset Rumah Jabatan Anggota DPR RI di Kalibata yang merupakan milik Sekretariat Negara, saat ini masih dalam proses pengalihan) yang termasuk kategori aset yang tidak disusutkan sehingga nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2013 tidak disusutkan.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	371.207.967.145
Mutasi tambah :		
- Pembelian	Rp	299.637.100
- Koreksi Pencatatan nilai/kuantitas	Rp	3.840.000
- Perolehan lainnya Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	1.114.285.289
	<u>Rp</u>	<u>1.417.762.389</u>
	Rp	372.625.729.534
Mutasi kurang :		
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas tindaklanjut LHP BPK atas pekerjaan renovasi RJA Kalibata	Rp	-1.644.077.892
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas bahan perpustakaan	Rp	-51.000
	<u>Rp</u>	<u>-1.644.128.892</u>
Saldo per 31 Desember 2013	<u>Rp</u>	<u>370.981.600.642</u>

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

- a. Transaksi penambahan berupa pembelian sebesar Rp299.637.100,00 merupakan pembelian bahan perpustakaan tercetak sebanyak 3.364 buah.
- b. Transaksi penambahan berupa koreksi tambah pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp3.840.000,00 merupakan koreksi pencatatan nilai/kuantitas bahan perpustakaan

tercetak.

- c. Transaksi penambahan yang merupakan perolehan lainnya yang menambah aset tetap dalam renovasi sebesar Rp1.114.285.289,00 berupa jalan di Rumah Jabatan Anggota di Kalibata.
- d. Transaksi pengurangan berupa koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp1.644.077.892,00 sebagai tindaklanjut LHP BPK tahun 2010 atas pekerjaan renovasi RJ Kalibata berupa kelebihan pembayaran yang telah lunas dikembalikan ke Kas Negara sebagaimana kesepakatan dalam tripartit Laporan Keuangan Tahun 2012 audited.
- e. Transaksi pengurangan berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp51.000,00.

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp370.981.600.642,00 terdiri dari :

- a. Aset Tetap Lainnya yang berupa koleksi barang perpustakaan dan budaya, saldo per 31 Desember 2013 sesuai asersi final sebesar Rp3.576.984.731,00 dengan kuantitas 96.341 buah, mutasi tambah sebesar Rp303.477.100,00 dengan kuantitas 3.364 buah dan mutasi kurang sebesar Rp51.000,00.

Koleksi barang perpustakaan dan budaya tersebut terdiri dari:

KODE	AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG	KUANTITAS	SALDO PER 1 JANUARI 2013	KUANTITAS	SALDO PER 31 DESEMBER 2013
135121	ASET TETAP LAINNYA				
6.01.01	Bahan perpustakaan tercetak	92.718 Unit	2.884.836.931	96.082 Unit	3.188.263.031
6.01.03	Kartografi, naskah dan lukisan	22 Unit	56.551.000	22 Unit	56.551.000
6.02.01	Barang bercorak kesenian	17 Unit	81.185.700	17 Unit	81.185.700
6.02.02	Alat bercorak kebudayaan	220 Unit	250.985.000	220 Unit	250.985.000
	JUMLAH	92.977 Unit	3.273.558.631	96.341 Unit	3.576.984.731

- b. Aset Tetap Lainnya, yang dikategorikan ke dalam Aset Tetap Renovasi merupakan nilai atas renovasi/pembangunan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2010. Aset tersebut kepemilikan dan pencatatannya dilakukan Sekretariat Negara (rincian terlampir) dan sampai saat ini belum dilakukan kapitalisasi ke Sekretariat Negara. Saldo per 31 Desember 2013 sesuai dengan asersi final terdapat koreksi tambah

sebesar Rp1.114.285.289,00 sehingga menjadi sebesar Rp352.417.962.054,00 dari Rp351.303.676.765,00. Mutasi aset tetap dalam renovasi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	352.947.754.657
Mutasi tambah :		
- Perolehan lainnya Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	1.114.285.289
	Rp	1.114.285.289
	Rp	354.062.039.946
Mutasi kurang :		
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas tindakan lanjut LHP BPK atas pekerjaan renovasi RJA Kalibata	Rp	-1.644.077.892
	Rp	-1.644.077.892
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	352.417.962.054

Aset Tetap dalam Renovasi saat ini masih dalam proses penyerahan ke Sekretariat Negara sebagai pencatat dan pemilik aset Rumah Jabatan kalibata sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor KU.00/03179/SETJEN DPR RI/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Kapitalisasi Aset Renovasi RJA Kalibata dan akan segera diproses lebih lanjut pada Semester I Tahun Anggaran 2014 (surat terlampir).

Aset Tetap dalam Renovasi tersebut terdiri dari:

1	Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Rp	346.438.046.570
2	Jalan, irigasi dan jaringan dalam renovasi	Rp	5.979.915.484
	Jumlah	Rp	352.417.962.054

- c. Aset Tetap Lainnya berupa pengembangan nilai atas tanah bangunan perkantoran DPR RI seluas 404.823 m² sebesar Rp14.986.653.857,00 berdasarkan Nota Kesepakatan Tripartit No. 023/PB.6.4./2009 tanggal 15 April 2010 harus direklasifikasikan dari aset tanah karena aset tanah tersebut bukan milik DPR RI yang Permohonan Pelepasan Hak Penggunaan Lahan (HPL) masih dalam proses. Tanah Perkantoran DPR RI tersebut merupakan tanah hak milik dan masih tercatat dalam aset tetap Yayasan Gelora Bung Karno. Pengelolaan tanah perkantoran seluas 404.823 m² masih dalam proses penyerahan dari Yayasan Gelora Bung Karno kepada DPR RI. Setelah pelepasan HPL diperoleh, maka pengembangan tanah kompleks perkantoran DPR RI akan disesuaikan.

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp4.360.968.400,00

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp4.360.968.400,00 dan Rp4.042.335.400,00 yang merupakan pekerjaan konsultan perencana dan pekerjaan yang belum diserahterimakan ke DPR RI sampai dengan tanggal neraca. Saldo KDP per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.360.968.400,00 terdiri dari saldo per 1 Januari 2013 sebesar Rp4.042.335.400,00, mutasi tambah sebesar Rp318.633.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang. Selain itu, terdapat belanja pemeliharaan yang membentuk KDP sebesar Rp196.317.000,00.

Mutasi KDP adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	4.042.335.400
Mutasi tambah :		
- Pekerjaan konsultan perencana	Rp	119.346.000
- Honor panitia pekerjaan konsultan	Rp	2.970.000
- Pekerjaan pemindahan jalan keluar dan peningkatan struktur parkir motor	Rp	196.317.000
	<u>Rp</u>	<u>318.633.000</u>
	Rp	4.360.968.400
Mutasi kurang :		
- -	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	4.360.968.400

Transaksi penambahan dan pengurangan KDP adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi penambahan sebesar Rp318.633.400,00 berupa pekerjaan konsultan perencana, honor panitia konsultan dan pekerjaan peningkatan struktur parkir yang belum ada BAST sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, terdiri dari :

1	Pekerjaan konsultan perencanaan rehabilitasi sistem penanggulangan bahaya kebakaran gedung Nusantara III dan Gedung Setjen	Rp	45.542.000
2	Pekerjaan konsultan perencanaan arsitektur dan struktur transportasi dalam gedung Nusantara II DPR RI	Rp	28.201.000
3	Pekerjaan konsultan perencana mekanikal elektrikal transportasi dalam Gedung Nusantara II DPR RI	Rp	45.603.000
4	Honor panitia Pekerjaan konsultan perencanaan rehabilitasi sistem penanggulangan bahaya kebakaran gedung Nusantara III dan Gedung Setjen	Rp	990.000
5	Honor panitia Pekerjaan konsultan perencanaan arsitektur dan struktur transportasi dalam gedung Nusantara II DPR RI	Rp	990.000
6	Honor panitia Pekerjaan konsultan perencana mekanikal elektrikal transportasi dalam Gedung Nusantara II DPR RI	Rp	990.000
7	Pekerjaan pemindahan jalan masuk keluar dan peningkatan struktur parkir motor DPR RI	Rp	196.317.000
	Jumlah	Rp	318.633.000

b. Dalam KDP tidak terdapat transaksi pengurangan.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.360.968.400,00 tersaji dalam tabel 32 berikut ini:

Tabel 32
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013

No	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan konsultan perencanaan pembuatan sprinkler tanaman kompleks DPR RI	Rp 35.661.000
2	Pekerjaan konsultan perencanaan penggantian pagar batas Taman Ria Komplek DPR RI	Rp 36.388.000
3	Pekerjaan pembuatan railing pagar dan pembuatan marka area parkir motor	Rp 85.000.000
4	Penambahan ambalan area parkir motor	Rp 97.000.000
5	Pekerjaan konsultan perencanaan revitalisasi saluran depan lingkungan Komplek DPR RI	Rp 36.212.000
6	Pekerjaan Konsultan perencana renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR RI	Rp 32.912.000
7	Pekerjaan Konsultan perencana perbaikan Ruang Kerja Anggota Gedung Nusantara I DPR RI	Rp 33.906.400
8	Pekerjaan konsultan perencana interior Gedung Nusantara IV DPR RI	Rp 32.516.000
9	Pembangunan gedung parkir motor yang dikategorikan sebagai KDP pada tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum ada BAST (Berita Acara Serah Terima) ke Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga masih dikategorikan sebagai KDP	Rp 3.652.740.000
10	Pekerjaan konsultan perencanaan rehabilitasi sistem penanggulangan bahaya kebakaran gedung Nusantara III dan Gedung Setjen	Rp 45.542.000
11	Pekerjaan konsultan perencanaan arsitektur dan struktur transportasi dalam gedung Nusantara II DPR RI	Rp 28.201.000
12	Pekerjaan konsultan perencana mekanikal elektrikal transportasi dalam Gedung Nusantara II DPR RI	Rp 45.603.000
13	Honor panitia Pekerjaan konsultan perencanaan rehabilitasi sistem penanggulangan bahaya kebakaran gedung Nusantara III dan Gedung Setjen	Rp 990.000
14	Honor panitia Pekerjaan konsultan perencanaan arsitektur dan struktur transportasi dalam gedung Nusantara II DPR RI	Rp 990.000
15	Honor panitia Pekerjaan konsultan perencana mekanikal elektrikal transportasi dalam Gedung Nusantara II DPR RI	Rp 990.000
16	Pekerjaan pemindahan jalan masuk keluar dan peningkatan struktur parkir motor DPR RI	Rp 196.317.000
Jumlah		Rp 4.360.968.400

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
(793.825.694.236,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp793.825.694.236,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel 33 berikut ini :

Tabel 33
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 634.196.973.114	Rp 476.259.993.161	Rp 157.936.979.953
2	Gedung dan Bangunan	Rp 811.031.260.536	Rp 294.321.688.597	Rp 516.709.571.939
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 67.937.884.595	Rp 23.244.012.478	Rp 44.693.872.117
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 370.981.600.642	Rp -	Rp 370.981.600.642
	Jumlah	Rp 1.884.147.718.887	Rp 793.825.694.236	Rp 1.090.322.024.651

Aset Lainnya Rp
37.007.310.589,00

C.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA. 002) Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp8.310.399.000,00 dan koreksi kurang sebesar Rp10.911.611.353,00 sehingga nilai asersi final aset lainnya menjadi sebesar Rp37.007.310.589,00 dari sebesar Rp39.608.522.942,00 sedangkan jumlah aset lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp45.032.237.430,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2013 tersaji pada tabel 34 berikut ini:

Tabel 34
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2013

No	Uraian	TA 2013		TA 2012
		Unaudited	Audited	
1	Aset Tak Berwujud	Rp 19.642.691.474	Rp 27.953.090.474	Rp 18.259.646.774
2	Aset Lain-lain	Rp 26.140.326.206	Rp 15.228.714.853	Rp 26.772.590.656
Saldo per 31 Desember 2013		Rp 45.783.017.680	Rp 43.181.805.327	Rp 45.032.237.430
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi aset lainnya		Rp -6.174.494.738	Rp -6.174.494.738	Rp -
Nilai buku per 31 Desember 2013		Rp 39.608.522.942	Rp 37.007.310.589	Rp 45.032.237.430

Aset Tak Berwujud
Rp
27.953.090.474,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA. 002) Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp8.310.399.000,00 sehingga asersi final aset tak berwujud menjadi sebesar Rp27.953.090.474,00 dari sebesar Rp19.642.691.474,00. Sedangkan saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp18.259.646.774,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud di DPR RI terdiri dari *software*, lisensi dan aset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Penambahan aset tak berwujud ini berasal dari belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal fisik lainnya.

Rincian aset tak berwujud per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel 35 berikut ini:

Tabel 35
Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

No	Unit Eselon I	TA 2013		TA 2012
		Unaudited	Audited	
1	Sekretariat Jenderal	Rp 19.642.113.974	Rp 27.952.512.974	Rp 18.259.069.274
2	Dewan	Rp 577.500	Rp 577.500	Rp 577.500
Jumlah		Rp 19.642.691.474	Rp 27.953.090.474	Rp 18.259.646.774

Sedangkan mutasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	18.259.646.774
Mutasi tambah :		
- Pembelian	Rp	1.383.044.700
- Reklasifikasi dari aset lain-lain	Rp	8.310.399.000
	Rp	27.953.090.474
Mutasi kurang :		
- -	Rp	-
	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	27.953.090.474

Mutasi penambahan dan pengurangan ATB adalah sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan berupa pembelian sebesar Rp1.383.044.700,00 terdiri dari :

1	Software	18 unit	Rp	402.529.800
2	Lisensi	14 unit	Rp	723.882.500
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	3 unit	Rp	256.632.400
Jumlah		35 unit	Rp	1.383.044.700

b. Transaksi penambahan berupa reklas dari aset lain-lain sebesar Rp8.310.399.000,00 merupakan hasil kajian/penelitian;

c. Transaksi pengurangan berupa transaksi normalisasi BMN aset tetap sebanyak 1700 unit lisensi yang telah dilakukan koreksi nilai tetapi belum dilakukan koreksi kuantitas karena lisensi berlaku selama 1 tahun.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel 36 berikut ini:

Tabel 36
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013

KODE	AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG	KUANTITAS	SALDO PER 1 JANUARI 2013	KUANTITAS	SALDO PER 31 DESEMBER 2013
1	2	3	4	5	6
162151	SOFTWARE				
8.01.01	Aset Tak Berwujud	228 Unit	15.970.839.611	246 Unit	16.373.369.411
162161	LISENSI				
8.01.01	Aset Tak Berwujud	1.723 Unit	194.636.000	37 Unit	918.518.500
162171	Hasil Kajian/ Penelitian				
8.01.01	Aset Tak Berwujud	0	0	2	8.310.399.000
162191	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA				
8.01.01	Aset Tak Berwujud	182 Unit	2.094.171.163	185 Unit	2.350.803.563
Jumlah		2.133 Unit	18.259.646.774	470 Unit	27.953.090.474

Aset Lain-lain Rp
15.228.714.853,00

C.3.1.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA. 002) Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi kurang sebesar Rp10.911.611.353,00 sehingga nilai asersi final aset lain-lain menjadi sebesar Rp15.228.714.853,00 dari sebesar Rp26.140.326.206,00. Sedangkan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp26.772.590.656,00. Aset lain-lain ini merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkungan DPR RI serta belanja modal yang dikategorikan sebagai aset lain-lain. Sedangkan nilai buku aset lain-lain per 31 Desember 2013 adalah nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp6.174.494.738,00 adalah sebesar Rp9.054.220.115,00

Mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	26.772.590.656
Mutasi tambah :		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lain-lain	Rp	910.544.950
	Rp	27.683.135.606
Mutasi kurang :		
- Pengajuan penghapusan barang hilang ke Pengelola BMN	Rp	-632.264.450
- Usulan Barang rusak berat ke Pengelola Barang	Rp	-910.544.950
- Reklasifikasi ke aset Gedung dan Bangunan	Rp	-2.008.301.830
- Reklasifikasi ke aset tak berwujud	Rp	-8.310.399.000
- Reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin	Rp	-147.120.435
- Reklasifikasi ke aset jalan, jaringan dan irigasi	Rp	-445.790.088
	Rp	-12.454.420.753
Nilai Perolehan per 31 Desember 2013	Rp	15.228.714.853
Akumulasi Penyusutan	Rp	-6.174.494.738
Nilai buku per 31 Desember 2013	Rp	9.054.220.115

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain terdiri dari :

- Transaksi penambahan berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain sebesar Rp910.544.950,00 berupa alat angkutan kendaraan bermotor karena sudah tidak digunakan lagi dalam operasional kantor.
- Transaksi pengurangan sebesar Rp632.264.450,00 berupa alat komunikasi yang hilang dan telah diajukan usulan penghapusan atas barang hilang dimaksud kepada Pengelola BMN dengan surat Sekjen DPR RI No. KU.02/11996/DPR R I/XII/2012 tanggal 19

Desember 2012 (surat terlampir).

- c. Transaksi pengurangan sebesar Rp910.544.950,00 berupa alat angkutan kendaraan yang telah diajukan usulan penghapusan barang rusak berat ke Pengelola Barang dengan Surat Usulan Ijin Penghapusan BMN No. SJ/11056/SETJEN DPR RI/KU.02/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan serta diputuskan dengan SK Sekjen No. 116/SEKJEN/2014 tanggal 7 Januari 2014. Penghapusan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2014.
- d. Transaksi pengurangan sebesar Rp2.008.301.830,00 berupa reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan, yaitu pekerjaan konsultan perencanaan penataan ulang kompleks gedung DPR RI.
- e. Transaksi pengurangan sebesar Rp8.310.399.000,00 berupa reklasifikasi ke aset tak berwujud yaitu pekerjaan konsultan perencana AMDAL dan Master plan Komplek Gedung DPR RI, Konsultan manajemen konstruksi pembangunan Gedung Kantor DPR RI, konsultan perencana pembangunan Gedung Kantor DPR RI, honor-honor panitia pembangunan gedung kantor, dan jamuan rapat dalam rangka pembangunan gedung kantor.
- f. Transaksi pengurangan sebesar Rp147.120.435,00 merupakan reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin berupa koreksi nilai kios box informasi dan peralatan komputer lainnya, pengumuman lelang pengadaan komputer, dan pengadaan benda-benda museum;
- g. Transaksi pengurangan sebesar Rp445.790.088,00 merupakan reklasifikasi ke aset jalan, jaringan dan irigasi berupa pengadaan jaringan kabel pita lebar dan pengadaan instalasi jaringan TV LCD dan TV Lainnya.

Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp15.228.714.853,00 berada di 2 (dua) Satker yaitu Satker Sekretariat Jenderal dan Satker Dewan.

1. Untuk Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp14.209.936.233,00, rincian aset lain-lain terdiri dari:
 - a. Aset Lain-lain yang masih harus ditelusur dokumen pendukungnya sebesar Rp1.953.926.493,00. Sebelumnya akun ini berjumlah sebesar Rp12.865.537.846,00 yang dicoba untuk diidentifikasi berdasarkan dokumen pendukungnya dengan hasil yang bisa dirinci sebagai berikut:

- Belanja modal yang terdefinisi sebagai aset lain-lain pada TA 2007 *audited* sebesar Rp1.747.861.000,00 setelah dilakukan penelusuran dokumen dengan hasil indentifikasi sebagai berikut:

Direklasifikasikan sebagai:

- Peralatan dan Mesin	Rp	91.850.000
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	358.182.000

Nilai Aset Lain-lain yang masih perlu ditindaklanjuti:

- Belanja pemeliharaan	Rp	1.095.979.000
- Barang habis pakai	Rp	201.850.000
		<u>Rp</u>
		1.747.861.000

- Belanja modal yang terdefinisi sebagai aset lain-lain TA 2008 *audited* sebesar Rp4.283.047.868,00 setelah dilakukan penelusuran dokumen dengan hasil indentifikasi sebagai berikut :

Direklasifikasikan sebagai:

- Peralatan dan Mesin	Rp	11.983.345
- Gedung dan Bangunan	Rp	2.209.830
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	1.473.220
- Aset Tak Berwujud	Rp	4.152.896.000

Nilai Aset Lain-lain yang masih perlu ditindaklanjuti:

- Belanja Pemeliharaan	Rp	93.472.157
- Belum teridentifikasi	Rp	21.013.316
		<u>Rp</u>
		4.283.047.868

- Belanja modal yang terdefinisi sebagai aset lain-lain TA 2009 *audited* sebesar Rp2.530.092.458,00 setelah dilakukan penelusuran dokumen dengan hasil indentifikasi sebagai berikut:

Direklasifikasikan sebagai:

- Peralatan dan Mesin	Rp	43.287.090
- Gedung dan Bangunan	Rp	2.006.092.000
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	86.134.868
- Aset Tak Berwujud	Rp	26.000.000

Nilai Aset Lain-lain yang masih perlu ditindaklanjuti:

- Belanja pemeliharaan	Rp	115.155.910
- Belum teridentifikasi	Rp	253.422.590
		<u>Rp</u>
		2.530.092.458

- Belanja modal yang terdefinisi sebagai aset lain-lain TA 2010 *audited* sebesar Rp4.304.536.520,00 setelah dilakukan penelusuran dokumen dengan

hasil indentifikasi sebagai berikut :

Direklasifikasikan sebagai:

- Sebagai Aset Tak Berwujud	Rp	4.131.503.000
Nilai Aset Lain-lain yang masih perlu ditindaklanjuti:		
Belanja Pemeliharaan	Rp	18.097.500
Belum teridentifikasi	Rp	154.936.020
	Rp	4.304.536.520

Dari belanja modal tahun 2007-2010 yang masih harus ditelusur dokumen pendukungnya, yang dikategorikan sebagai Aset Lain-lain saldo sebesar Rp 1.953.926.493,00 terdiri dari yang belum teridentifikasi dan akan ditindaklanjuti di Semester I TA 2014 sebesar Rp429.371.926,00, sebesar Rp1.322.704.567,00 sebagai belanja non modal dan sebesar Rp201.850.000,00 sebagai barang pakai habis akan segera dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mekanisme reklas dari aset lain-lain.

b. Aset yang sudah tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan sebesar Rp12.256.009.740,00 yang terdiri dari:

1. BMN tidak digunakan karena tidak diketemukan wujud barang saat dilakukan IP tahun 2009 namun barang tersebut ada dan telah beralih fungsi serta telah diusulkan penghapusannya dari BA-04 Rp 292.853.282
2. BMN tidak digunakan karena tidak diketemukan wujud barang saat dilakukan IP tahun 2009 namun serta telah diusulkan penghapusannya dari BA-04 Rp 139.117.630
3. BMN tidak digunakan karena tidak ditemukan wujud barangnya saat dilakukan IP tahun 2009 dan akan ditelusuri Rp 11.824.038.828

Aset yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebelum dilakukan usulan penghapusan masih diberlakukan penyusutan, dengan rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku sebagai berikut:

Kode	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
166112 Aset Tetap Yang tidak Digunakan				
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 304.138.728	Rp 304.138.728	Rp -
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 3.173.124.912	Rp 954.258.194	Rp 2.218.866.718
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 8.778.746.100	Rp 4.916.097.816	Rp 3.862.648.284
	Jumlah	Rp 12.256.009.740	Rp 6.174.494.738	Rp 6.081.515.002

2. Sedangkan aset lain-lain di satker Dewan merupakan pembayaran listrik dan telepon anggota di tahun

anggaran 2004 yang tak tertagih sesuai audit BPK tahun 2006 sebesar Rp1.018.778.620,00.

KEWAJIBAN

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek Rp
50.400.784.437,00*

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 terdapat koreksi kurang sebesar Rp27.500.000,00 dan koreksi tambah sebesar Rp8.396.500,00 sehingga nilai asersi final menjadi sebesar Rp50.400.784.437,00 dari sebesar Rp50.419.887.937,00, sedangkan nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp25.334.723.613,00.

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian kewajiban jangka pendek tersaji dalam tabel 37 berikut ini:

Tabel 37
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013

Kewajiban Jangka Pendek	TA 2013		TA 2012
	Unaudited	Audited	
Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 36.270.999.029	Rp 36.271.895.529	Rp 1.122.258.712
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 950.999.168	Rp 930.999.168	Rp 773.655.004
Uang Muka dari KPPN	Rp -	Rp -	Rp 4.187.884.264
Pendapatan Yang Ditangguhkan	Rp 13.197.889.740	Rp 13.197.889.740	Rp 19.250.925.633
Jumlah	Rp 50.419.887.937	Rp 50.400.784.437	Rp 25.334.723.613

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada pihak Ketiga Rp
36.271.895.529,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikoreksi dengan Nota Kesepakatan Perubahan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) tanggal 8 Mei 2014 terdapat koreksi bertambah sebesar Rp896.500,00 sehingga nilai asersi final menjadi sebesar Rp36.271.895.529,00 dari sebesar Rp36.270.999.029,00. Sedangkan nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.122.258.712,00.

Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas) bulan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel 38 berikut ini:

Tabel 38
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013

No.	Eselon I	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	Rp 670.395.500
		Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp 1.498.586.150
		Belanja modal yang masih harus dibayar	Rp 52.173.000
		Utang kepada pihak ketiga lainnya	Rp 7.462.569.650
		Jumlah	Rp 9.683.724.300
2	Dewan	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	Rp 12.200.361.229
		Utang kepada pihak ketiga lainnya	Rp 14.387.810.000
		Jumlah	Rp 26.588.171.229
Total			Rp 36.271.895.529

- Belanja pegawai yang belum dibayarkan berupa honorarium tenaga ahli Anggota Dewan dan Asisten Pribadi, tunjangan-tunjangan anggota Dewan bulan Desember 2013 serta uang makan nasional bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan dan uang lembur yang belum diambil;
- Belanja barang yang masih harus dibayar berupa penggunaan langganan daya dan jasa bulan Desember 2013 yang belum dibayarkan;
- Belanja modal yang masih harus dibayar berupa Belanja pekerjaan penambahan sarana benda-benda museum sesuai SP No.09/SP/MUS/ARDOK-P3DI/2013 tanggal 13 November 2013;
- Utang kepada pihak ketiga lainnya berupa honorarium terkait output kegiatan, uang lelah dan transport pegawai bulan Desember 2013 yang belum diberikan kepada yang berhak.

Mutasi utang pihak ketiga per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	1.122.258.712
Mutasi tambah :		
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar	Rp	12.870.756.729
- Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp	1.498.586.150
- Belanja modal yang masih harus dibayar	Rp	52.173.000
- Utang kepada pihak ketiga lainnya	Rp	21.850.379.650
	Rp	36.271.895.529
	Rp	37.394.154.241
Mutasi kurang :		
- Belanja pemeliharaan dan belanja operasional yang telah dibayarkan	Rp	538.780.000
- Belanja pembentuk BMN yang telah dibayarkan berupa pembelian risograph, asesoris kendaraan dinas Setjen sesuai hasil verifikasi BPKP	Rp	373.020.120
- Belanja pegawai yang telah dibayarkan berupa honorarium tenaga ahli anggota dan asisten pribadi anggota	Rp	210.458.592
	Rp	1.122.258.712
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	36.271.895.529

Pendapatan
diterima dimuka Rp
930.999.168,00

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2013 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan DPR RI (BA.002) Tahun 2013 Nomor NK.070/PB.6.4/2014 tanggal 28 April 2014 terdapat koreksi tambah sebesar Rp7.500.000,00 dan koreksi kurang sebesar Rp27.500.000,00 sehingga nilai asersi final menjadi Rp930.999.168,00 dari Rp950.999.168,00. Sedangkan nilai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp773.655.004,00.

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2013 dapat disajikan dalam tabel 39 berikut ini:

Tabel 39
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013

No	Eselon I	TA 2013		TA 2012
		Unaudited	Audited	
1	Sekretariat Jenderal	Rp 950.999.168	Rp 930.999.168	Rp 773.655.004
2	Dewan	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 950.999.168	Rp 930.999.168	Rp 773.655.004

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

Saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.187.884.264,00

Uang muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP)

atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian saldo uang muka dari KPPN yang masih dikuasai satuan kerja di DPR RI disajikan dalam tabel 40 berikut ini:

Tabel 40
Rincian Uang Muka dari KPPN

Kode Satker	Nama Satker	TA 2013	TA 2012
001012	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp 3.577.922.564
001030	Dewan	Rp -	Rp 609.961.700
Jumlah		Rp -	Rp 4.187.884.264

C.4.4. Pendapatan yang Ditangguhkan

*Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp
13.197.889.740,00*

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp13.197.889.740,00 dan Rp19.250.925.633,00.

Pendapatan yang ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNPB dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel 41 berikut ini:

Tabel 41
Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013

No	Uraian	TA 2013	TA 2012
1	Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam negeri TA 2013 yang belum disetorkan ke kas negara	Rp 13.197.158.676	Rp 15.965.305.785
2	Pengembalian belanja honor yang belum disetorkan ke kas negara	Rp 586.250	Rp 3.285.578.750
3	Jasa giro rekening Bendahara Penerimaan	Rp 144.814	Rp 41.098
Jumlah		Rp 13.197.889.740	Rp 19.250.925.633

EKUITAS

C.5. EKUITAS DANA LANCAR

*Ekuitas Dana
Lancar Rp
15.342.238.187,00*

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 tersaji dalam tabel 42 berikut ini:

Tabel 42
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No	Ekuitas Dana Lancar	TA 2013		TA 2012
		Unaudited	Audited	
1	Cadangan Piutang	Rp 7.462.500	Rp 514.884.861	Rp 7.431.065.113
2	Cadangan Persediaan	Rp 16.693.240.133	Rp 17.309.111.644	Rp 14.890.423.697
3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp -1.550.759.150	Rp -1.550.759.150	Rp -911.800.120
4	Barang/jasa Yang Harus Diserahkan	Rp -950.999.168	Rp -930.999.168	Rp -773.655.004
Jumlah		Rp 14.198.944.315	Rp 15.342.238.187	Rp 20.636.033.686

Cadangan Piutang
Rp514.884.861,00

C.5.1. Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp514.884.861,00 dan Rp7.431.065.113,00. Cadangan Piutang merupakan jumlah ekuitas dana lancar DPR RI dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan
Rp
17.309.111.644,00

C.5.2. Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp17.309.111.644,00 dan Rp14.890.423.697,00. Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar DPR RI dalam bentuk persediaan.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
Rp(1.550.759.150,00)

C.5.3. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar minus Rp1.550.759.150,00 dan minus Rp911.800.120,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Barang/jasa yang harus diserahkan
Rp(930.999.168,00)

C.5.4. Barang/jasa yang harus diserahkan

Jumlah barang/jasa yang harus diserahkan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar minus Rp930.999.168,00 dan minus Rp773.655.004,00. Perkiraan ini merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Ekuitas Dana Investasi
Rp
1.320.009.460.640,00

C.6. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi

per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 tersaji dalam tabel 43 berikut ini:

Tabel 43
Rincian Ekuitas Dana Investasi

No	Ekuitas Dana Investasi	TA 2013	TA 2012
1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp 1.283.092.150.051	Rp 2.039.975.897.857
2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp 37.007.310.589	Rp 45.032.237.430
	Jumlah	Rp 1.320.099.460.640	Rp 2.085.008.135.287

C.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 1.283.092.150.051,00

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.283.092.150.051,00 dan Rp2.039.975.897.857,00. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

C.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 37.007.310.589,00

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp37.007.310.589,00 dan Rp45.032.237.430,00. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

Pengungkapan
Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. CATATAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan terhadap kepemilikan Rusa Totol di kawasan gedung MPR/DPR/DPD RI yang bersumber dari Hibah Istana Bogor pada tahun 2008, berdasarkan cek fisik oleh pihak Bagian Gedung dan Pertamanan per 31 Desember 2013 rusa yang ada berjumlah 67 ekor, dengan rincian Rusa Jantan 26 ekor, Rusa Betina 30 ekor dan anakan 11 ekor.

D.2. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah 3 (tiga) buah rekening yang masih dipertahankan sampai saat ini, yaitu :

No.	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian Negara/Lembaga	BA.Es.1	Jenis Rekening (giro/deposito)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Setjen	DPR RI	01	Giro	1020000022035	Bendahara Pengeluaran Satker Setjen	Sekjen DPR RI	Bank Mandiri Capem DPR RI	0
2	Setjen	DPR RI	01	Giro	1020005225658	Bendahara Penerimaan Satker Setjen	Sekjen DPR RI	Bank Mandiri Capem DPR RI	144.814,82
3	Dewan	DPR RI	02	Giro	1020000021094	Bendahara Pengeluaran Satker Dewan	Sekjen DPR RI	Bank Mandiri Capem DPR RI	0,70

D.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada awal tahun anggaran 2013 terjadi pergantian pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Pengguna Anggaran a.n. Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si digantikan oleh DR. Winantuningtyastiti S, M.Si sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23/M tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.